



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SARWONO**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **500821**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.045.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/70 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 4000 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 60 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 2000 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 123.000.000

1. MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 13.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.181.000.000

III. HUTANG Rp. 400.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 781.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.